

PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PNF DAN PTK-PNF DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI UPTD SKB SUMBAWA)

Agus Sadid *

Abstract

Within last ten years, the Indonesian government has been implementing decentralization policy by giving autonomous authority to the regions to strengthen the local governments and to develop their areas. The decentralization policy is expected to motivate the local government and people to accelerate the development including human resource development. This study aimed at describing how the decentralization and the autonomous authority effected the quality improvement of the non-formal education and the tutors at Learning Activity Center (LAC) in Sumbawa. Using qualitative approach, this research collected data by observation and interview to analyze qualitatively. The analysis concludes that there is no significant improvement of non-formal education program and personnel. Besides, the local government's policy does not encourage the development of non-formal education programs. Finally, it can be concluded that the existing autonomy does not stimulate the development of non-formal education and personnel.

Key words: decentralization, authonomy, education reformation

PENDAHULUAN

Memasuki pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi, kewenangan pemerintah pusat terutama dalam mengatur dan mengelola tugas-tugas pemerintahan telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah pola pendekatan dari sentralistis kepada desentralistis. Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota. Salah satu kewenangan pusat yang didelegasikan kepada Kabupaten/kota adalah pendidikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Pidarta dalam Zainuddin, (2008:93) bahwa urusan pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah Kabupaten/kota termasuk bidang pendidikan.

Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut berimplikasi luas kepada peran dan fungsi pemerintah daerah termasuk pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dalam mengembangkan kerangka sistem pemerintahan yang baru dan berjiwa *strong reform* semakin mendapat penekanan dan perhatian dari berbagai pihak. Bahwa keterlaksanaan otonomi daerah sangat bergantung kepada (1) dukungan para *stakeholders*, (2) komitmen dan konsistensi para kepala dinas/instansi/institusi di bidang pendidikan dalam mengimplementasikan otonomi pendidikan, dan (3) pelibatan para penentu kebijakan (penyusun, dan pembuat peraturan) dalam

mendukung otonomi di bidang pendidikan. Jadi, desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari kerangka otonomi daerah yang berimplikasi pada perimbangan keuangan pusat daerah baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran.

Selanjutnya, bahwa esensi dari otonomi di bidang pendidikan adalah kegiatan pendesentralisasian kewenangan. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindah tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang semula terpusat menjadi pendidikan yang berbasis kebutuhan daerah atau masyarakat. Titik berat pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah lebih mengutamakan pada peningkatan peran dan partisipasi daerah terutama masyarakat dalam rangka terselenggaranya pendidikan seperti apa yang diinginkan untuk dilaksanakan di daerah, sehingga desentralisasi pendidikan menghasilkan otonomi (Djohar, 2003:88). Dikarenakan otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau lembaga, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pemberdayaan penyelenggaraan pendidikan di daerah (Tilaar dalam Zaenuddin, 2008:94). Jadi, melalui otonomi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran peserta didik. Kondisi ini juga akan memberikan peluang kepada satuan pendidikan untuk berkompentensi memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

* Pamong Belajar SKB Sumbawa NTB

Studi pendahuluan yang penulis lakukan, berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan di bidang PNF, menunjukkan bahwa kondisi pendidikan nonformal saat sebelum otonomi daerah masih lebih baik daripada masa otonomi daerah saat ini. Bahwa anggaran PNF sebelum otonomi daerah jauh lebih tinggi daripada masa otonomi daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa otonomi daerah masih belum mampu mengangkat kualitas pendidikan nonformal secara maksimal. Otonomi daerah di bidang pendidikan, khususnya pendidikan nonformal masih belum mampu memandirikan lembaga atau seseorang, yang terjadi justru sebaliknya yaitu semangat ketergantungan masih sangat besar. Hal yang nyata dapat dilihat dari pelaksanaan program-program PNF di UPTD SKB Sumbawa. Untuk tahun 2008, pelaksanaan program PNF sepenuhnya dibiayai oleh pusat (melalui dana bansos/dekon dari BPKB dan BPPNFI reg.VII Mataram). Dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten sangat terbatas (baca:tidak ada). Jika hal tersebut terus menerus terjadi, maka bagaimana dengan komitmen untuk mengembangkan kualitas program PNF di Kabupaten Sumbawa dan juga peningkatan kualitas PTK-PNF-nya?.

Bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan pada akhirnya akan diukur melalui perubahan-perubahan yang terjadi pada kinerja pendidikan di tingkat lokal (Kabupaten/kota) dengan indikator utama

berupa (1) pemerataan, (2) mutu dan (3) akumulasi sumberdaya. Desentralisasi pendidikan yang juga merupakan bentuk dari reformasi pendidikan seharusnya membawa banyak harapan, perubahan, dan peningkatan yang signifikan sesuai dengan indikator di atas.

Beberapa pertanyaan yang selanjutnya merupakan fokus penelitian akan dijawab melalui penelitian ini adalah (1) bagaimanakah deskripsi peningkatan kualitas program PNF dan PTK-PNF di era otonomi daerah pada Kabupaten Sumbawa, (2) bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan program PNF di Kabupaten Sumbawa, dan (3) bagaimana keberpihakan pemerintah daerah terhadap SKB sebagai satu-satunya UPT yang membidangi permasalahan PNF di Kabupaten Sumbawa.

Bertolak dari permasalahan tersebut maka tujuan dari kajian ini adalah (1) mendeskripsikan peningkatan kualitas program PNF dan PTK-PNF di UPT SKB Sumbawa di era otonomi daerah, (2) mendeskripsikan berbagai kebijakan pengembangan program PNF di SKB Sumbawa dengan melakukan komparasi bagaimana program-program PNF di SKB Sumbawa sebelum dan sesudah otonomi daerah, dan (3) mendeskripsikan bentuk keberpihakan pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap SKB Sumbawa, sebagai satu-satunya UPT yang membidangi permasalahan PNF.

KAJIAN TEORETIS

Reformasi Pendidikan dan Otonomi Pendidikan

Reformasi merupakan suatu bentuk perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi juga dapat berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah. Reformasi juga bermakna memperbaiki, membenarkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan (www.researchengines.com). Beberapa pakar seperti David D Curtis dalam Danim (2003:45) menyebutkan bahwa ada empat strategi mayor dalam reformasi pendidikan yaitu (1) akuntabilitas berbasis standar (*standards-based accountability*) yaitu penerapan atau penetapan standar keluaran yang jelas dan pengujian sistematis atas kemajuan siswa, (2) reformasi lembaga

pendidikan (sekolah/sanggar) secara menyeluruh (*whole-school reform*) yaitu balikan atas tradisionalitas reformasi sekolah yang bersifat inkremental, kebijakan yang sebatas memacu target spesifik, struktur dan metode-metode instruksional yang rigid, (3) strategi pasar (*market strategies*) yaitu bahwa pendidikan merupakan pranata sosial yang menawarkan jasa layanan yang bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional, dan bahkan spiritual, serta (4) pembuatan keputusan yang bersifat demokratis atau pelimpahan kewenangan dalam pembuatan (*shared decision-making*) yaitu sebuah strategi sistematis yang berfokus pada pemberdayaan pendidik dan administrator di tingkat sekolah.

Namun demikian, keterlaksanaan reformasi pendidikan sangat bergantung pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh David Conley dalam Danim (2003:48). Ia mengidentifikasi dimensi mayor reformasi pendidikan yaitu (1) standar belajar, (2)

kurikulum, (3) pembelajaran, (4) penilaian, (5) lingkungan belajar, (6) teknologi pembelajaran, (7) hubungan lembaga pendidikan (sekolah/sanggar), (8) waktu belajar dan mengajar, (9) pengelolaan, (10) kepemimpinan baik guru/pamong belajar maupun kepala sekolah/lembaga pendidikan/sanggar, (11) personalia, dan (12) hubungan kontraktual.

Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah. Otonomi pendidikan sejatinya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokratis sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Tilaar dalam Zaenuddin (2000:94) menyebutkan bahwa konsep otonomi pendidikan mencakup enam aspek, yaitu (1) pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, (2) manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan, (3) penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan *stakeholders* pendidikan, dan (6) pengembangan infrastruktur sosial/ pendidikan.

Dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan di setiap daerah, bertolak dari semangat UU Nomor 20 tahun 2003 maka adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Pemberian aksentuasi kepada pemerintah daerah diharapkan nantinya dapat meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di tingkat lokal akan lebih efektif karena jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya pasal 50 ayat (4) disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Manulang (2009) secara eksplisit menyebutkan bahwa terdapat empat dampak positif dari desentralisasi pendidikan, sebagai berikut (1) peningkatan mutu yaitu dengan kewenangan yang dimiliki oleh satuan pendidikan (sekolah/sanggar) maka mereka akan lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki, (2) efisiensi keuangan/ anggaran hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional, (3) efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat, dan (4) perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan (www.pakguruonline.pendidikan.net, 2009).

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu bentuk rekonstruksi kebijakan pemerintah terhadap penyesuaian pelaksanaan otonomi daerah. Lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah telah memberi warna yang signifikan terhadap sistem pendidikan nasional, demikian juga model-model pendidikan di setiap daerah. Jadi desentralisasi pendidikan mengandung makna sebagai pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan, mencakup (1) aspek substantif yang meliputi teknis edukatif, personel, finansial, sarana prasarana, administratif, dan (2) aspek fungsi manajemen (www.one.indoskripsi.com, 2009).

Untuk mewujudkan berbagai perubahan kearah desentralisasi pendidikan memerlukan empat hal, yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan dari tingkat daerah, provinsi sampai ke tingkat lembaga, (2) pembinaan kemampuan daerah, (3) pembentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendidikan, dan (4) perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Jadi, pada hakikatnya rekonstruksi pendidikan menuju desentralisasi pendidikan berlandaskan pada (1) mutu pendidikan, (2) efisiensi, (3) relevansi pendidikan, dan (4) pemerataan kesempatan pendidikan.

Permasalahan Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Manulang (2009) mengidentifikasi beberapa kendala pelaksanaan otonomi pendidikan, meliputi (1) belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat Kabupaten/kota, (2) pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonomi karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai, (3) dana pendidikan dan APBD yang belum memadai, (4) kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam mengelola pendidikan, (5) otoritas pemimpin dalam hal ini adalah bupati/walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama dan (6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana prasarana dan dana yang dimiliki (www.pakguruonline.pendidikan.net, 2009).

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Supriadi. Desentralisasi pendidikan, sebagaimana disinyalir oleh Supriadi (2004:12) ternyata masih belum memberikan dampak yang kuat. Sebagai salah satu contoh misalnya desentralisasi pendidikan di jalur pendidikan formal. Supriadi selanjutnya menyatakan bahwa (1) tidak ada bukti yang menunjukkan meningkatnya akumulasi sumber daya pendidikan yang digali dari masyarakat meningkat karena desentralisasi pendidikan, (2) desentralisasi bukan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan jumlah siswa dan efisiensi internal pendidikan, (3) mutu pendidikan tidak menunjukkan peningkatan yang berarti sebagai akibat dari desentralisasi. Di Chile mutu pendidikan menurun 14% untuk bahasa Spanyol dan 6% untuk matematika. Secara tegas Hannaway&Carnoy dalam Supriadi (2004:8) menyatakan bahwa tidak jelas dampak desentralisasi terhadap mutu pendidikan.

Kondisi yang sama juga dikemukakan oleh pihak Depdagri dalam Supriadi (2004:6) yang menyatakan bahwa meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 2001, tetapi peran pemerintah daerah belum banyak berubah terutama dari segi

pengalokasian anggaran/ dana untuk sektor pendidikan. Kalau banyak pemerintah daerah sekarang merasa bangga karena telah membelanjakan antara 20-30% dari RAPBD-nya untuk pendidikan, hal itu sebetulnya belum mengubah keadaan di masa lalu karena yang dikeluarkan adalah dana yang bersumber dari DAU yang diterima dari pusat. Jadi pekerjaan pemerintah daerah sekarang hanya sebatas menyalurkan dana yang dialokasikan dalam DAU. Jadi, kontribusi pemerintah daerah masih belum signifikan terhadap pendidikan.

Permasalahan yang nampak pada cukup sulitnya pengimplementasian reformasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, misalnya di sekolah adalah (1) kemampuan keuangan yang tidak memadai, (2) kepemimpinan kepala sekolah yang tidak kompeten, (3) komitmen guru yang rendah, (4) persepsi negatif dari masyarakat, (5) penataan staf, (6) kurikulum, (7) konflik politik dan gerakan rasial, (8) keterbatasan fasilitas, dan (9) komunikasi yang tidak kondusif. Dalam konteks SKB, penulis berpendapat bahwa sejatinya kondisi tersebut juga muncul dan merupakan penyebab sulitnya melakukan reformasi di sanggar.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan rancangan studi kasus. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian etnografi, lama penelitian adalah tiga bulan (Februari s.d. April 2009). Seperti dikatakan oleh Strauss dan Corbin dalam Zaenuddin (2004:94-95) bahwa metode-metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena atau gejala yang seringkali merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Jadi metode kualitatif merupakan reaksi terhadap tradisi positivisme dan postpositivisme dan mengorientasikan penelitian dalam kerangka kerja yang bersifat interpretatif.

Penelitian ini mengambil lokasi di SKB Kabupaten Sumbawa. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling technique*). Informan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama, yaitu kepala SKB, Kepala Dinas diknas, dan Kabid PNFI). Selanjutnya, informan pendukung seperti pengelola program PNF, penilik PLS,

dan tutor PNF. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi langsung (*participative observation*). Secara umum, pengambilan data dilakukan dalam dua tahap, yaitu observasi dan wawancara secara simultan dan mendadak. Kegiatan analisis data dilakukan secara induktif. Hal ini dilakukan untuk menemukan inferensi atau simpulan akhir terhadap data yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari lokasi penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan kerangka berpikir analisis data yang diadaptasi dari model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sadid dkk (2008:122) yang terdiri atas empat tahap yaitu (1) tahap pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, serta (4) verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir. Selanjutnya, untuk memperoleh temuan dan interpretasi data yang absah perlu diupayakan pengecekan data dengan menggunakan kriteria yang dapat menilai kebenaran data (kredibilitas), transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas (Lincoln dan Guba dalam Zaenuddin,2008:95).

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Kelembagaan SKB Sumbawa

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara dengan para informan, menunjukkan bahwa SKB Sumbawa telah memiliki rumusan visi dan misi yang cukup kuat dan terukur. Berikut adalah visi dan misi SKB Sumbawa:

Visi

Menjadi Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) yang berkualitas dan profesional sehingga dapat mewujudkan *samawa mapis rungan*

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan program-program percontohan PNFI yang berkualitas.
2. Memberikan pelayanan program PNFI kepada warga masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
3. Meningkatkan mutu ketenagaan Pendidik dan Kependidikan PNFI melalui program Diklat teknis dan fungsional, serta pembinaan teknis.
4. Memperkuat kelembagaan SKB Kabupaten Sumbawa sebagai UPTD Diknas Kabupaten Sumbawa di bidang PNFI melalui peningkatan kapasitas dan sarana prasarana yang memadai.

Merujuk pada deskripsi rumusan visi dan misi di atas, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) rumusan visi dan misi cukup mampu menggambarkan target dan pencapaian-pencapaian yang akan dilakukan ke depan, (2) rumusan visi juga cukup kontekstual dan selaras dengan *grand design* pembangunan di pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan (3) memuat konsistensi dengan tujuan pendidikan nasional, terutama pembangunan atau rencana strategis pemerintah untuk sektor pendidikan nasional.

Otonomi daerah yang resmi diberlakukan di Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2001, telah membawa perubahan kelembagaan SKB Sumbawa secara signifikan. Salah satunya adalah segera diterbitkannya perda kelembagaan SKB Sumbawa melalui SK Bupati Sumbawa nomor 182 tahun 2002 tanggal 30 Maret 2002 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pokok SKB Sumbawa. Perda tersebut memberikan status hukum yang kuat terhadap SKB Sumbawa. Jika dibandingkan dengan SKB-SKB di Provinsi NTB maka SKB Sumbawa merupakan SKB yang pertama memiliki Perda sejak otonomi daerah. Beberapa SKB, seperti SKB Lombok Tengah justru mengalami nasib yang sangat menyedihkan yaitu dilikuidasi oleh pemerintah

daerah setempat. Meskipun kemudian tahun 2008, baru SKB Lombok tengah tersebut “dihidupkan” kembali.

Bertolak dari temuan terhadap kelembagaan SKB Sumbawa. Berikut penulis deskripsikan sejarah berdirinya SKB Sumbawa. Berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 023/0/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar yang biasa disebut dengan sanggar adalah merupakan unit pelaksana tekhnis kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tugas tersebut tetap sama, meskipun pelaksanaan Otonomi Daerah diberlakukan semenjak tahun 2001, terutama di daerah propinsi NTB. Hal yang berubah adalah perubahan status SKB, di mana sebelum Otonomi Daerah, SKB merupakan UPT pusat, tetapi setelah Otonomi Daerah berubah menjadi UPT Dinas diknas Kabupaten/Kota.

Bertolak dari temuan di atas, hal yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa kelembagaan SKB Sumbawa pascaotonomi daerah mengalami perubahan yaitu perubahan status kelembagaan bahwa sebelum otonomi daerah SKB Sumbawa merupakan UPT pemerintah pusat yang menangani pendidikan luar sekolah (PNF), kemudian selama otonomi daerah SKB Sumbawa berubah menjadi UPT dinas diknas Kabupaten Sumbawa. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tugas dan fungsi SKB secara prinsip masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Berikut ini adalah deskripsi tugas dan fungsi SKB Sumbawa.

Tugas dan fungsi

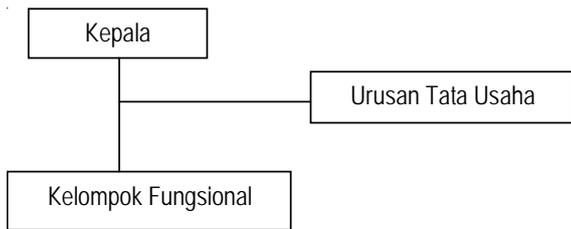
SKB mempunyai tugas melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga berdasarkan kebijakan teknis Dirjen Diklusepora. Secara lengkap dapat disebutkan, dalam SK Mendikbud RI Nomor 023/0/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar, bahwa fungsi SKB adalah.

- a. Pembangkitan dan penumbuhan kemajuan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- b. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan.
- c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan Diklusepora.

- d. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan Diklusepora.
- e. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal.
- f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar.
- g. Pengintegrasian dan penyikronisasian kegiatan sektoral dalam bidang Diklusepora.
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana Diklusepora.
- i. Pengelolaan urusan tata usaha Sanggar.

Susunan organisasi

SKB merupakan UPTPNF Dinas diknas yang berada di Kabupaten/kota. Struktur organisasi SKB terdiri dari (1) kepala, (2) tata usaha, dan (3) kelompok jabatan fungsional. Kelompok tata usaha, meliputi (a) urusan (b) kearsipan, (d) urusan kepegawaian, (e) urusan keuangan, dan (f) urusan perlengkapan. Sedangkan kelompok fungsional adalah PB.



Gambar 1. Struktur organisasi SKB

Bertolak pada temuan di atas, terkait kelembagaan dan struktur organisasi, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) tidak terdapat perubahan yang signifikan sehingga dapat disebut sebagai sebuah reformasi pendidikan di area SKB Sumbawa yang merupakan satu-satunya UPT dinas diknas yang menangani permasalahan PNF, (2) kelembagaan dan struktur organisasi serta tugas dan fungsi SKB Sumbawa di era otonomi daerah cenderung sama dengan era sebelum otonomi daerah, dan (3) kondisi yang ada di SKB Sumbawa saat ini cenderung bersifat *status quo*.

Kondisi demikian juga diperkuat oleh kepala dinas diknas Kabupaten Sumbawa yang menyatakan bahwa seyogyanya struktur, kelembagaan, tugas, dan fungsi SKB Sumbawa harus merujuk kepada SK yang lama, karena hal ini untuk mempermudah pekerjaan serta menghindari persoalan dengan pihak dewan (baca:DPRD). Hasilnya adalah proses penetapan kelembagaan SKB Sumbawa di DPRD Kabupaten Sumbawa cukup singkat, meskipun secara tegas kepala SKB menyatakan bahwa di era otonomi daerah,

semangat reformasi seharusnya ada dan harus dinampakan pada rumusan tugas dan fungsi SKB Sumbawa.

Pada aspek ketenagaan yang meliputi tenaga tata usaha dan tenaga teknis (pamong belajar). Hasil temuan menunjukkan bahwa jumlah tenaga (personel) yang ada di SKB Sumbawa mengalami penyusutan atau pengurangan secara signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh (1) kebijakan pemerintah Kabupaten yang memutasi (khususnya pamong belajar) ke instansi lain, (2) permintaan pindah tugas (mutasi keluar Kabupaten), dan (3) tidak ada formasi untuk tenaga (CPNS) untuk ditempatkan di SKB Sumbawa, hal ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan pengadaan pegawai oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan (4) pensiun pegawai.

Ketenagaan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan sebuah organisasi. Semakin besar organisasi atau jangkauan atau ruang lingkup pekerjaan maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang besar pula. Pada kenyataannya, kondisi yang diharapkan pada SKB Sumbawa tidak dapat terpenuhi, yaitu jumlah ketenagaan yang memadai. Selama era otonomi daerah, penyusutan ketenagaan karena alasan di atas sangat nyata terjadi. Sebagai bahan perbandingan, berikut penulis paparkan secara kuantitatif kondisi pegawai SKB Sumbawa sebelum dan sesudah otonomi daerah:

Tabel 1. Deskripsi Ketenagaan SKB Sumbawa Lima Tahun Terakhir (setelah Otonomi Daerah)

No	Tahun	Jumlah Ketenagaan			Keterangan
		Kepala	Staf TU	PB	
1	2	3	4	5	6
1.	2004	1	4	9	1 PB mutasi
2.	2005	1	4	8	1 PB mutasi
3.	2006	1	3	7	1TU pensiun
4.	2007	1	3	6	
5.	2008	1	3	6	

(Sumber: Arsip Kepegawaian SKB Sumbawa)

Tabel 2. Deskripsi Ketenagaan SKB Sumbawa Lima Tahun Terakhir (sebelum otonomi daerah)

No	Tahun	Jumlah Ketenagaan			Keterangan
		Kepala	Staf TU	PB	
1	2	3	4	5	6
1.	1997	1	6	10	
2.	1998	1	6	10	
3.	1999	1	5	9	
4.	2000	1	5	9	
5.	2001	1	5	9	

(Sumber: arsip kepegawaian SKB Sumbawa)

Berdasarkan paparan data ketenagaan di atas maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) secara kuantitatif jumlah ketenagaan SKB (staf TU dan PB) mengalami penurunan, (2) pemerintah Kabupaten Sumbawa kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pegawai di SKB Sumbawa, dan (3) kebijakan pengadaan atau formasi CPNS untuk SKB Sumbawa tidak ada.

Deskripsi Program PNFI di SKB Sumbawa

Perhatian masyarakat terhadap masalah pendidikan tidak pernah surut. Hal yang paling dominan adalah tentang mutu pendidikan. Namun, pada saat orang membicarakan masalah mutu pendidikan tidak nampak secara jelas (*clear visible*) pengertian mutu yang sebenarnya. Padahal diketahui bahwa pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Hal yang jelas bahwa kualitas suatu bangsa tersebut dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Pengalaman beberapa negara maju di dunia, kemajuan selalu dimulai dengan pendidikannya (Maksum & Ruhendi, 2004:227).

Kebutuhan terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan sesuatu yang mendesak. Bahwa pendidikan yang berkualitas tersebut haruslah merata pada semua jalur pendidikan yang meliputi (1) pendidikan formal, (2) nonformal, dan (3) informal. Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Kualitas pendidikan, meliputi (1) produk pendidikan yang dihasilkan berupa persentase peserta didik yang berhasil lulus dan lulusan tersebut dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia atau membuka lapangan kerja sendiri, baik dengan cara meniru atau menciptakan yang baru, (2) proses pendidikan, menyangkut pengelolaan kelas yang sesuai dengan kondisi kelas yang relatif kecil, penggunaan metode pengajaran yang tepat serta lingkungan masyarakat yang kondusif, dan (3) adanya kontrol pada sumber-sumber pendidikan yang ada (Sihombing & Indardjo, 2003:7).

Banyak hal yang menjadi faktor menurunnya kualitas pendidikan nonformal di Kabupaten Sumbawa. Selain faktor tersebut di atas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor koordinasi dan persamaan visi dan misi di antara sesama pengambil kebijakan (pemangku kepentingan) yaitu di tingkat Dinas diknas Kabupaten Sumbawa (baca: SubDin PNFI) dan UPTD SKB Kabupaten Sumbawa yang masih belum maksimal. Di era otonomi daerah, kedua *leading* sektor tersebut mempunyai peran yang sangat strategis. Dinas diknas Kabupaten Sumbawa sebagai perumus dan penyusun program-program PNF. Sedangkan SKB

merupakan pelaksana (*excecutor*) karena SKB memiliki tenaga fungsional (pamong belajar). Kedua unsur tersebut harus bersenyawa, satu kata, persepsi, dan visi misi sehingga pelaksanaan program PNFI di lapangan menjadi lebih optimal. Kurang optimalnya pencapaian pendidikan nonformal tersebut mengindikasikan bahwa *leading* sektor PNF masih belum mampu menyamakan persepsi, visi, dan misi tentang pengembangan program-program PNFI di Kabupaten Sumbawa.

Temuan hasil penelitian pada aspek penguatan program-program PNF yang dikembangkan di SKB Sumbawa pada era otonomi daerah mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, terutama dari aspek anggaran yang diberikan kepada SKB Sumbawa. Padahal, UPT PNF yang berfungsi sebagai pengembang program-program percontohan PNF sangat membutuhkan anggaran yang memadai. Secara kuantitatif dapat penulis sampaikan perkembangan anggaran PNF untuk SKB dari tahun 2004 s.d. 2008, sebagaimana nampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Perkembangan Anggaran PNF untuk SKB dari tahun 2004-2008

No	Tahun	Besarnya Anggaran (Rp.)			Keterangan
		Dikmas	Binmud	Olahraga	
1	2	3	4	5	6
1.	2004	30.000.000	-	-	
2.	2005	-	-	-	
3.	2006	21.000.000	-	-	
4.	2007	11.000.000	-	-	
5.	2008	10.000.000	-	-	

(Sumber: RASK SKB Sumbawa)

Sebagai perbandingan, kondisi anggaran SKB Sumbawa sebelum otonomi daerah, berikut penulis sajikan hasil temuan berdasarkan dokumen keuangan di SKB Sumbawa:

Tabel 4. Besarnya Anggaran PNF SKB Sumbawa (sebelum otonomi daerah)

No	Tahun	Besarnya Anggaran (Rp.)			Keterangan
		Dikmas	Binmud	Olahraga	
1	2	3	4	5	6
1.	1997	17.500.000	11.000.000	6.000.000	
2.	1998	17.500.000	8.000.000	6.000.000	
3.	1999	35.000.000	10.000.000	8.000.000	
4.	2000	35.000.000	10.000.000	8.000.000	
5.	2001	25.000.000	10.000.000	8.000.000	

(Sumber: arsip keuangan SKB Sumbawa)

Berdasarkan temuan di atas maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) jumlah anggaran PNF untuk SKB Sumbawa selama otonomi daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan sebelum otonomi daerah, (2) anggaran PNF untuk SKB selama otonomi daerah menyatu dengan anggaran subdin PNF dinas diknas Kabupaten Sumbawa, (3) rincian alokasi dana program PNF sebelum otonomi daerah terperinci dengan jelas, sebaliknya selama otonomi daerah alokasi dana tumpang tindih dengan subdin PNF dinas diknas Kabupaten Sumbawa. Secara eksplisit, dapat penulis katakan bahwa dari sisi anggaran, masa sebelum otonomi daerah masih lebih baik dari masa setelah otonomi daerah.

SKB Sumbawa sebagai satu-satunya UPT yang membidangi PNF, terus berupaya memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program-program PNF yang berkualitas. Keberpihakan pemerintah pusat (baca: Depdiknas), berdasarkan temuan di lapangan, cukup kuat terutama dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi strategis SKB sebagai ujung tombak penyelenggaraan program-program PNF di masyarakat, salah satunya adalah melalui pemberian dana *block grant* (hibah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk *block grant* tersebut sangat berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas (diversifikasi) program-program PNF di SKB Sumbawa. Berikut hasil temuan penulis beberapa program yang didanai melalui program *block grant* PNF di SKB Sumbawa.

- (1) Program PNF, yaitu.
 - (a) program pendidikan kesetaraan (paket B setara SMP dan paket C setara SMA),
 - (b) program PAUD kelompok bermain.
 - (c) program kursus (komputer, menjahit dan bahasa Inggris).
 - (d) program pendidikan kecakapan hidup (pertanian, peternakan, pertukangan kayu, mengelas, dan otomotif).
 - (e) program pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF).
- (2) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PNF, di antaranya melalui:

 - (a) pendidikan dan pelatihan.
 - (b) kursus.
 - (c) magang/ studi banding, dan
 - (d) bantuan pendidikan S1 (beasiswa S1).

(3) program *updating* data PTK-PNF dalam rangka pemetaan dan pengembangan SIM PNF.

Selanjutnya temuan di lapangan terhadap besarnya dana *block grant* yang diberikan pusat baik melalui dana dekon maupun APBN-P adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Besarnya Dana *Block Grant* PNF yang Diterima SKB Sumbawa

No	Tahun	Besarnya Anggaran (Rp.)			Keterangan
		Dikmas	Binmud	Olahraga	
1	2	3	4	5	6
1.	1997	17.500.000	11.000.000	6.000.000	
2.	1998	17.500.000	8.000.000	6.000.000	
3.	1999	35.000.000	10.000.000	8.000.000	
4.	2000	35.000.000	10.000.000	8.000.000	
5.	2001	25.000.000	10.000.000	8.000.000	

(Sumber: arsip keuangan SKB Sumbawa)

Dari paparan data di atas mengindikasikan bahwa (1) peran pemerintah pusat melalui dana-dana *block grant* yang disalurkan oleh BPKB, BPPLSP, dan BPPNFI merupakan penopang utama bergerak dan berjalannya program-program PNF di SKB Sumbawa, (2) diversifikasi program PNF banyak dipicu oleh "campur tangan" pemerintah pusat melalui program-program *block grant* PNF.

Era otonomi daerah yang seharusnya membawa angin perubahan yang kuat terhadap paradigma penyelenggaraan pendidikan nonformal, diindikasikan masih belum berdampak kuat terhadap (1) kualitas dan (2) kuantitas hasil-hasil pelaksanaan program PNF di Kabupaten Sumbawa. Kondisi tersebut nampaknya dapat dilihat dari (1) keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengembangan program-program PNF, terutama dalam merespon dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pusat yang bersifat strategis, diantaranya adalah kesediaan menyediakan dana-dana pendampingan (*sharing found*) untuk PNF, (2) relatif rendahnya alokasi anggaran PNF dalam APBD II. Data diknas Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa alokasi dana PNF hanya sebesar 5% dari dana pendidikan yang ada. Lebih dari 12% dari 18.5% total dana pendidikan diperuntukan kepada pendidikan formal, (diknas Kab.Sumbawa, 2008:15). Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi dana pendidikan maka semakin berkualitas penyelenggaraan pendidikan (hubungan linier). Mengamati kenyataan ter-sebut, penulis berpendapat bahwa pendidikan nonformal di Kabupaten Sumbawa sejatinya bukan sedang berkembang, tetapi diam (*stagnan*) meskipun bukan berarti mati suri (kemunduran).

Hingar-bingar otonomi daerah (setelah 8 tahun berjalan di Kabupaten Sumbawa), yang berimbas pada otonomi pendidikan pada kenyataannya masih belum berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan kualitas pendidikan terutama pada bidang pendidikan nonformal. *Pertama*, semangat kemandirian dalam otonomi pendidikan masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal, masih sangat terbatas. Biaya-biaya penyelenggaraan program PNF masih 95% ditanggung oleh pemerintah (terutama pemerintah pusat, melalui APBN), salah satunya. Pada tingkat kepedulian, hal ini juga masih menunjukkan tingkat yang relatif rendah. Banyak masyarakat yang membiarkan atau bahkan menghalangi penyelenggaraan program-program PNF, misalnya program paket B setara SMP. Sikap masyarakat tersebut, kebanyakan disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap pendidikan nonformal (baca: paket B setara SMP). Pembiaran dan tindak pengacuan terhadap program-program PNF di masyarakat mengindikasikan bahwa (1) tingkat pengetahuan, (2) tingkat motivasi, (3) tingkat tanggung jawab, dan (4) kontrol terhadap kualitas penyelenggaraan program PNF, masih sangat terbatas, minim, dan rendah.

Menguatkan pernyataan di atas, bahwa reformasi pendidikan di “dunia PNF” merupakan sesuatu yang cukup berat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Eugene Schaffer, dkk., dalam Supriadi, (20004:8) yang menyatakan bahwa mewujudkan reformasi pendidikan dalam era otonomi daerah banyak menemukan kendala di antaranya adalah (1) kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas, (2) kepemimpinan kepala sekolah atau sanggar, dan (3) konflik politik serta gerakan rasial maupun ego sektoral.

Deskripsi Hasil-Hasil Pembelajaran PNF di SKB Sumbawa

Program PNF adalah program yang dinamis. Sifat kedinamisan ini dikuatkan oleh Soemantri dalam Sadid & Suhrawardi, (2008:13) bahwa karakteristik PNF adalah dinamis, selalu mengikuti *trend* perkembangan IPTEK. Dalam konteks layanan PNF maka program-program PNF (1) beraneka ragam tujuan (*multiple purposes*), (2) beraneka ragam penyelenggaraan (*multiple agencies*), (3) beraneka ragam subjek sasaran (*multiple audiences*), dan (4) beraneka ragam tipe program (*multiple program*).

Mendeskripsikan hasil-hasil pembelajaran di SKB Sumbawa, penulis mereduksi hasil temuan menjadi tiga kelompok program, yaitu (1) kelompok program kesetaraan, (2) kelompok program

keaksaraan, dan (3) kelompok program pendidikan kecakapan hidup (*life skill*). Terkait dengan temuan pada hasil-hasil pembelajaran PNF di SKB Sumbawa, berikut penulis paparkan dalam bentuk tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Deskripsi Hasil Belajar Program Kesetaraan

No	Jenis Program PNF	Hasil Belajar/ Capaian Nilai UNPK			Prosentase Kelulusan
		2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6
1.	Paket A setara SD	5,50	5,0	-	100%
2.	Paket B Setara SMP	4,50	5,0	5,50	90%
3.	Paket C Setara SMA	4,0	5,0	5,8	95%

(Sumber: arsip SKB Sumbawa 2006-2008)

Tabel 7. Deskripsi Hasil Belajar Program Keaksaraan Fungsional (KF)

No	Jenis Program PNF	Hasil Belajar/Tingkat Ketuntasan			Prosentase Kelulusan
		2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6
1.	KF Tingkat Dasar (Sukma I)	7,5	7,0	7,0	100%
2.	KF Lanjutan (Sukma II)	7,0	7,5	7,5	100%
3.	KF Lanjutan (Sukma III)	7,5	8,0	8,0	100%

(Sumber: arsip SKB Sumbawa 2006-2008)

Tabel 8. Deskripsi Hasil Belajar Program Pendidikan Kecakapan Hidup

No	Jenis Program PNF	Hasil Belajar			Keterangan
		Mandiri	Belum sepenuhnya	Tidak mandiri	
1	2	3	4	5	6
1.	Kursus Komputer	24 orang	27 orang	5 orang	
2.	Kursus Bahasa Inggris	5 orang	20 orang	5 orang	
3.	Kursus Menjahit	20 orang	2 orang	3 orang	
4.	KWD	8 orang	1 orang	1 orang	
5.	KWK	9 orang	1 orang	-	
6.	KPP	5 orang	4 orang	1 orang	

(Sumber: arsip SKB Sumbawa, 2008)

Merujuk dari temuan-temuan di atas maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) perkembangan hasil-hasil pembelajaran yang selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik, (2) peran SKB Sumbawa sebagai salah satu lembaga yang berfungsi memberdayakan masyarakat melalui program PNF cukup berhasil.

Bahwa otonomi daerah merupakan reformasi besar-besaran terhadap sistem pemerintah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Otonomi pendidikan dalam konteks pendidikan nonformal merupakan peluang yang besar dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Pada aspek daerahan, Kabupaten Sumbawa masih

membutuhkan beragam layanan pendidikan yang bermutu. Dengan jumlah penduduk 402.645 jiwa, luas wilayah 6,643,98 km² (Bapeda Kab.Sumbawa, 2008:9), ternyata Sumbawa masih menyimpan permasalahan yang besar jika ditinjau dari sudut pendidikan. *Pertama*, tingkat melek aksara baru mencapai 85%, ini berarti masih ada 15% penduduk usia 15 th – 45 th yang belum mampu baca dan tulis. *Kedua*, jumlah tamat SD/MI tidak lanjut dan DO SD/Mi mencapai 24,93%, serta untuk tamat SMP/MTs tidak lanjut dan DO SMP/MTs mencapai 32,87%, (Diknas Kab.Sumbawa, 2008:21). Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa masih cukup memprihatinkan. Hal ini berarti tantangan dan peluang pemberdayaan masyarakat melalui program-program PNF oleh SKB masih sangat besar.

SKB adalah unit pelaksana teknis dinas diknas yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari dinas pendidikan kabupaten/kota di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga. Fungsi utama SKB adalah mengembangkan program-program percontohan PLS, seperti (1) kelompok belajar kesetaraan, (2) kelompok belajar kursus, (3) kelompok belajar keaksaraan fungsional, (4) kelompok belajar pendidikan anak usia dini, (5) kelompok belajar *life skill*, dan (6) pendidikan dan pelatihan pemuda. Menyadari strategisnya peran SKB Sumbawa terutama di era otonomi daerah maka reformasi pendidikan yang menyangkut penataan kelembagaan, tugas, dan fungsi SKB Sumbawa sangat mutlak diperlukan.

Reformasi pendidikan yang merupakan manifestasi dari sebuah otonomi daerah, seharusnya mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Namun demikian, reformasi pendidikan di lingkungan SKB Sumbawa masih belum terwujud secara optimal. dalam pandangan penulis, reformasi pendidikan pada SKB Sumbawa, sebagai satu-satunya UPT yang membidangi permasalahan PNF harus dilakukan melalui beberapa hal, yaitu.

(1) Reformasi kelembagaan SKB Sumbawa; dimensi ini merujuk pada perubahan secara mendasar struktur dan kelembagaan SKB Sumbawa yaitu melalui peningkatan status (eselonisasi) SKB Sumbawa menjadi eselon III (setingkat kantor/badan). Tegasnya, bahwa selama ini SKB Sumbawa menjadi eselon IV yang merupakan UPT Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, tetapi dengan menaikkan eselon SKB Sumbawa, menjadikan SKB Sumbawa sebagai UPT Pemkab.Sumbawa di bidang PNF akan memperkuat posisi tawar dan ini

akan berdampak pada peran operasional SKB Sumbawa dalam meningkatkan anggaran dan program-program PNF-nya. Otonomi daerah, sejatinya sangat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan reorganisasi, penggabungan, penaikan, dan pembentukan lembaga/instansi sesuai dengan kebutuhan daerah.

(2) Reformasi paradigma berpikir terhadap PNF. Bahwa masih banyak pejabat di lingkungan pendidikan yang berpikiran “sempit” dalam memaknai pendidikan hanya dalam konteks pendidikan formal berakibat pada (1) pengguyuran dana secara besar-besaran bagi pendidikan formal di antaranya pemberian dana BOS, BOM, sekolah model, sekolah SSN, sekolah bertaraf internasional, (2) pembangunan fisik (bangunan) sekolah SD-SMA, (3) menjadikan hasil-hasil di pendidikan formal sebagai rujukan untuk mengukur kualitas pendidikan, alat penentu APK/APM dan IPM. Merubah cara pandang, merupakan bagian dari reformasi pendidikan sebagai wujud otonomi daerah.

Namun demikian, posisi ketidakberdayaan SKB Sumbawa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan tujuannya juga tidak terlepas dari kinerja SKB Sumbawa itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SKB Sumbawa belum pernah mencapai atau meraih prestasi yang fenomenal dalam bidang pengembangan program PNF, (2) hasil akreditasi yang dilakukan oleh tim penilai menunjukkan bahwa SKB Sumbawa masih dalam *grade* atau peringkat B yang artinya bahwa kondisi sarana prasarana, hasil-hasil pembelajaran, bentuk-bentuk program yang ada SKB Sumbawa masih tergolong peringkat B (baik), dan *grade* ini tetap dipegang oleh SKB Sumbawa sampai dengan tahun 2009, (3) kualitas SDM (ketenagaan) juga masih belum memadai, terutama dilihat pada aspek kualitas pekerjaan dan kemampuan menyelesaikan masalah dilapangan.

Sebagai sebuah UPT yang membidangi permasalahan PNF, sudah sepatutnya SKB berkonsentrasi penuh untuk menunjukan kiprahnya kepada pemerintah daerah melalui prestasi dan hasil-hasil yang dikembangkan oleh SKB Sumbawa. Sadid dan Suhwardi (2008) menekankan pentingnya mengembangkan layanan program PNF di SKB yang tetap mengacu pada kebutuhan dan fitrah dari PNF, yaitu (1) berakar pada kebutuhan masyarakat, (2) bertolak dari pendidikan kritis, dan (3) menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran andragogi. Untuk itu, program PNF yang ada di SKB Sumbawa harus direncanakan dengan baik.

Tylor dalam Sanapiah (2006) merekomendasikan beberapa hal terkait dengan langkah-langkah dalam perencanaan pengembangan program yang meliputi (1) identifikasi kebutuhan, (2) rumuskan tujuan, (3) tentukan pengalaman belajar yang akan mendukung pencapaian tujuan, (4) organisasikan pengalaman belajar ke dalam rencana yang jelas, baik lingkup maupun urutannya, dan (5) lakukan evaluasi pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dalam semangat otonomi daerah, mewujudkan pendidikan nonformal yang berkualitas adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana dikatakan oleh Sanapiah

(2006) bahwa hal yang dibutuhkan untuk mencapai kearah tersebut adalah (1) kecakapan profesional para praktisi PNF di dalam menerapkan *grand theory* PNF itu sendiri baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi program beserta hasil-hasilnya, (2) kemantapan bangunan sistem PNF itu sendiri yang menjamin terkoordinir dan keterkendalian dalam pembinaan dan pengembangan mutu layanan dari aneka ragam program PNF, dan (3) komitmen dan integritas dari pemerintah daerah dalam mendukung program-program PNF yang berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Bertolak dari temuan penelitian di atas maka beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah *pertama*, peningkatan kualitas program PNF dan ketenagaan (PTK-PNF) di era otonomi daerah di SKB Sumbawa masih belum menunjukkan peningkatan atau perubahan yang signifikan. Secara kuantitas dan kualitas baik program PNF maupun PTK-PNF di SKB Sumbawa cenderung menunjukkan kondisi yang menurun. Hal ini terjadi karena (1) pemahaman pemkab terhadap SKB Sumbawa masih belum memadai, (2) kecenderungan penarikan ketenagaan atau mutasi pegawai di SKB Sumbawa menunjukkan tingkat yang relatif tinggi, terbukti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah pegawai SKB yang dimutasi mencapai 5 orang, (3) *overloading* (tumpang tindih) tugas dan fungsi dengan subbidang PNFI dinas diknas Kabupaten Sumbawa, (4) SKB belum difungsikan secara maksimal sebagai pusat percontohan PNFI di Kabupaten Sumbawa.

Kedua, kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pengembangan program-program PNF dikembangkan oleh SKB Sumbawa masih sangat memprihatinkan. Argumentasi terhadap hal tersebut adalah (1) diversifikasi program yaitu beragam program yang dikembangkan di SKB Sumbawa sebelum otonomi daerah lebih beragam/bervariasi dan terprogram dengan jelas daripada setelah otonomi daerah, (2) kualitas anggaran yaitu besarnya anggaran PNF sebelum otonomi daerah masih lebih baik daripada setelah otonomi daerah, dan (3) ketidakseimbangan dalam pemberian tekanan dan perhatian, lebih memperhatikan kebutuhan yang ada di pendidikan formal daripada di pendidikan nonformal.

Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah di bidang

pendidikan khususnya pendidikan nonformal belum membawa perubahan yang signifikan terutama bagi peningkatan eksistensi dan kualitas program-program PNF khususnya yang dikembangkan oleh SKB Sumbawa. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor pendidikan formal daripada pendidikan nonformal. SKB Sumbawa masih belum difungsikan secara optimal. Demikian juga kegiatan pembahasan program dan anggaran di dewan (DPRD II) khususnya membahas tentang PNF sangat kurang dilibatkan sehingga banyak keputusan dan alokasi anggaran yang ditentukan secara sepihak atau kurang proporsional yang pada akhirnya sangat merugikan SKB Sumbawa yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi tidak maksimal.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan maka berikut ini beberapa saran berkaitan dengan peningkatan kualitas program PNF dan PTK-PNF di era otonomi daerah sebagai berikut.

Pertama, kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa (bupati Sumbawa). Melakukan perubahan secara fundamental keberadaan SKB Sumbawa melalui perubahan kelembagaan SKB Sumbawa dengan menaikkan eselon SKB Sumbawa dari eselon IV menjadi eselon III; melibatkan peran aktif SKB Sumbawa setiap pembahasan atau dengar pendapat (*hearing*) dengan DPRD II pada saat pembahasan permasalahan PNF; memberikan perhatian dan kepedulian yang seimbang sebagaimana pemerintah kabupaten memberikan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan formal dan kepada kepala dinas diknas Kabupaten Sumbawa, menginstruksikan kepada subdin PNFI untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama

dalam meningkatkan kualitas serta mengembangkan program PNFI dengan SKB Sumbawa sehingga akan terdapat pembagian tugas yang terarah dan sinergis, serta merekomendasikan SKB Sumbawa sebagai pusat pengkajian, pengembangan, dan *think tank* pada bidang PNFI sehingga hasil-hasil pengkajian, pengembangan, dan produk SKB Sumbawa dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat/lembaga/individu yang tertarik dalam PNFI

Kedua, kepada kepala SKB Sumbawa. Membuat/menyusun/ mengajukan PERDA baru tentang

Kelembagaan SKB Sumbawa yang lebih tajam, kuat, dan mampu meningkatkan posisi tawar SKB Sumbawa sehingga pada akhirnya SKB Sumbawa dapat lebih meningkatkan kualitas dan layanan PNF yang lebih bermutu, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat di Kabupaten Sumbawa serta membangun lobi-lobi dan komunikasi intensif terutama dengan pihak dewan (DPRD II) pada saat pembahasan anggaran PNF sehingga dengan dukungan anggaran yang memadai, SKB Sumbawa dapat lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya

PENUTUP

- Bapeda Kabupaten Sumbawa. (2008). *Sumbawa dalam angka*. Dokumen tidak dipublikasikan
- Danim, S. (2003). *Agenda pembaharuan sistem pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diknas Kab. Sumbawa. (2008). *Laporan daya serap departemen pendidikan nasional kabupaten Sumbawa*. Dokumen tidak dipublikasikan
- Diknas Kab. Sumbawa. (2008). *Rencana pembangunan program PNF 2005-2010*. Dokumen tidak dipublikasikan
- Djohar. (2003). *Pendidikan strategik alternatif untuk pendidikan masa depan*. Yogyakarta: LESFI
- Indoskripsi. *Desentralisasi pendidikan*. Diakses tanggal 22 Mei 2009 dari www.one.indoskripsi.com.
- Maksum, A & Luluk, Y.R. (2004). *Paradigma pendidikan universal di era modern dan post-modern atas realitas baru pendidikan kita*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Manulang, M. (2009). *Otonomi pendidikan*. Diakses tanggal 21 Mei 2009 dari www.pakguruonline.pendidikan.net.
- Nurkolis. (2002). *Reformasi pendidikan luar biasa*. Diakses tanggal 21 Mei 2009 dari www.researchengines.com.
- Sadid, A & Suhrawardi. (2008). *Menguatkan layanan program PNF melalui manajemen peningkatan mutu di SKB*. Jurnal Aksa Sriti Volume 2 Tahun 2008: BPPNFI Reg.VII Mataram
- Sadid, dkk. (2008). *Pelaksanaan pembinaan profesionalisme pamong belajar dalam peningkatan kualitas pembelajaran kelompok belajar kesetaraan*. Jurnal Ilmiah Visi PTK-PNF. Vol.3 No.2 Tahun 2008
- Sanapiah, F. (2006). *Mengokohkan program layanan PNF: Hajatkan profesionalisme dan pembangunan sistem*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional PNF di Universitas Negeri Gorontalo, 15 Mei 2006
- Sihombing, U & Indardjo. (2003). *Pembiayaan pendidikan*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit
- Supriadi, D. (2004). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah otonomi daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah
- Zaenuddin, M. 2008. *Reformasi pendidikan di era otonomi daerah: kajian makna atas kebijakan biaya pendidikan*. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP). Jilid 15 Nomor 2 tahun 2008